

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Hasyim Muzadi dan Benediktus Bosu, **Menuju Indonesia Baru: Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia, Malang, 2005.
- Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.
- , **Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- , **Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- , **Perbandingan Pemberantasan Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Arifin Rada, **Kecurangan Dalam Birokrasi Pemerintah Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Korupsi**, Bayumedia, Malang, 2009.
- Aziz Syamsuddin, **Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- , **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, **Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**, Refika Aditama, 2008.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Bumi Pustaka, Jakarta, 1997.
- CI Harsono, **Sistem Baru Pembinaan Narapidana**, Djambatan, Jakarta, 1995.

- Darwan Prinst, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Evi Hartanti, **Tindak Pidana Korupsi**, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2005.
- Leden Marpaung, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Maria Farida Indrati Soeprpto, **Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya**, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Masdar F. Mas'udi, J. Suyuthi Pulungan, dkk, **Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama, Mewacanakan Fikih Anti Korupsi**, Gama Media, Yogyakarta, 2006.
- M. Arief Amrullah, **Tindak Pidana Pencucian Uang**, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- M. Sholehudin, **Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar *Double Track System* dan Implementasinya**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mardjono Reksodiputro, **Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga**, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- , **Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana**, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Miriam Budiardjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Alumni, Bandung, 1992.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005.
- Romli Atmasasmita, **Korupsi, Good Governance & Komisi Anti Korupsi di Indonesia**, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002.
- , **Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia**, PT. Alumni, Bandung, 1982.
- Sidik Sunaryo, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, UMM Press, Malang, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 2001.
- , **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

-----, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Subekti, **Kamus Hukum**, Pradya Paramita, Jakarta, 1977.

Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Yesmil Anwar dan Adang, **Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)**, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2011.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta, Bumi Aksara, 2001.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359.

Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-undangan Republik Indonesia No.M.09.HN 02.10 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223.

JURNAL

Bagir Manan, **Menjadi Hakim yang Baik**, Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA-RI, 2008.

B Arief Sidharta, **Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum**, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 3 Tahun II November, Jakarta, 2004.

MAJALAH DAN KORAN

Amir Syamsuddin, **Ratusan Koruptor Nikmati Remisi**, Jawa Pos, Selasa 6 Agustus 2012.

Mahadi, **Kamus Hukum: *Communis Opinio Doctorum***, Majalah Konstitusi (Berita Mahkamah Konstitusi), 33 Oktober 2009.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, **Reformasi Pidanaan**, Varia Peradilan Tahun ke XXV No. 290, Januari 2010.

Panggabean, **Penanganan Berbagai Hak-Hak Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Praktik Sehari-hari (Sikap Integratif Warga Binaan Mendukung Penerapan Keadilan Rehabilitatif)**, Varia Peradilan Tahun ke XXVII No. 332, Juli 2013.

Persepsi yang Sulit Berubah, *Transparency International*, Kompas, 1 Agustus 2011.

INTERNET

Anti Corruption Clearing House, **6 Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**, <http://acch.kpk.go.id> (18 Agustus 2013).

Budiman NPD Sinaga, **Negara Hukum**, (*online*), <http://bnpds.wordpress.com> (17 September 2013).

Busyro Muqoddas, **KPK Sesalkan Pemberian Remisi Bagi Terpidana Koruptor** (*online*), <http://skalanews.com>, (10 Agustus 2013).

Denny Indrayana, **Agus Condro Bersyukur Bebas Tepat Waktu** (*online*), <http://tempo.co>, (25 Agustus 2013).

Edward Panggabean, **Yusril: PP 99/2012 Diuji Karena Bertentangan UU Pemasarakatan**, (*online*), <http://news.liputan6.com>, (15 Januari 2014).

Herwan, **Korupsi dan Dampaknya**, (*online*), <http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id>, (12 September 2013).

Muchamad Iksan, **Dasar-Dasar Kebijakan Hukum Pidana Berperspektif Pancasila**, 2012, E-law (*online*), <http://hukum.ums.ac.id>, diakses 20 Juli 2013.

